

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Semenanjung Korea adalah wilayah yang berada di kawasan Asia Timur Laut. Dalam sejarahnya Semenanjung Korea merupakan wilayah yang sangat penting di kawasan tersebut karena menghubungkan Asia Timur dengan dunia luar. Semenanjung Korea berada di tengah tiga Negara besar yaitu Cina, Jepang, dan Rusia. Seperti yang di ketahui saat ini Korea terbagi mejadi dua Negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Terbaginya Korea menjadi dua ini akibat dari Perang Dunia II. Konflik ideologi antara Korea Utara dan Korea Selatan adalah alasan terpecahnya Korea tersebut. Korea Utara yang menganut ideologi Komunis-Sosialis sementara Korea selatan menganut ideologi Liberal-Demokratis. Kedua Korea ini saling mencari pengaruh untuk kepentingan strategis masing-masing yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan di semenanjung Korea dan Asia Timur (Sukma, 1992).

. Stabilitas politik dan keamanan di Semenanjung korea masih belum memperlihatkan keadaan yang membaik pasca Perang Dingin. Perang Korea berkembang menjadi perang internasional yang melibatkan Korea Selatan beserta 16 negara anggota PBB untuk berperang melawan Korea Utara, Cina dan Uni Soviet. Perang Korea ini berakhir dengan gencatan senjata yang menghasilkan garis gencatan senjata sepanjang 155 mil yang membagi Semenanjung Korea. Pada umumnya masalah semenanjung Korea terus berlanjut sampai sekarang akibat pengembangan nuklir Korea Utara. Pengembangan nuklir Korea Utara sudah dilakukan sejak tahun 1970-an sampai saat ini yang membuat perhatian dunia internasional (Dwianto, 2000)

Program nuklir Korea Utara dicetuskan oleh pemikiran Kim Il Sung. Menurutnya, untuk melindungi keamanan nasional Korea Utara tidak perlu lagi bergantung pada Negara

lain. Pengembangan nuklir yang dilakukan Korea Utara ini dipercaya dapat memberikan keuntungan strategis, simbolis, dan teknologi yang dibutuhkan dalam jangka panjang untuk mewujudkan Korea Utara yang kuat dan makmur. Korea Utara memanfaatkan nuklir untuk kepentingan politik internasional dan menjadikan alat untuk berdiplomasi dunia internasional. Sejak terpecahnya Negara Korea, Korea Utara menjadi Negara yang sangat tertutup terhadap dunia internasional. Hal ini mengakibatkan komunikasi yang minim terhadap dunia luar dan terkucilkan akibat pandangan negatif dunia internasional (Setiawati, 2003).

Nuklir menjadi sarana Negara Korea Utara untuk bersaing di Dunia Internasional, Nuklir juga menjadi senjata mereka agar memiliki nilai dan power dalam mengambil kebijakan atau tindakan untuk kepentingan rezimnya. Meski banyaknya kecaman dari Dunia Internasional, Korea Utara tetap menjalankan misi meningkatkan kekuatan Nuklir mereka sendiri. Faktor utama yang membuat Negara Korea Utara melakukan pengembangan nuklir adalah dengan melihat adanya system kekuasaan nasional yang bersifat bipolar antara Negara Amerika Serikat dan Negara Uni Soviet, serta eratnya hubungan diplomatik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Jepang yang melatar belakangi Korea Utara memilih untuk bersekutu dengan Uni Soviet. Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Jepang semakin erat pada tahun 1965 juga merupakan faktor utama untuk Korea Utara mengembangkan senjata nuklir sebagai strategi deterens (Emma, 2014).

Dari segi eksternal, alasan Korea Utara tetap mengembangkan nuklir ialah intervensi yang dilakukan Amerika Serikat pada perang Korea yang menghalangi tujuan Presiden Kim Il Sung untuk menyatukan Korea. Dari segi internal dikarenakan Ideologi yang dianut oleh Korea Utara yang dikenal dengan *juche*. Kim Il Sung yang merupakan pemimpin pertama Korea Utara memperkenalkan ideologi tersebut sebagai ideologi resmi Korea Utara pada tahun 1950-an. *Juche* diartikan sebagai kepercayaan diri yang lebih luas lagi dipahami sebagai sikap mandiri. dalam memenuhi kebutuhan sendiri tanpa tergantung negara lain. *Juche* merupakan inti dari pengawasan politik yang dimiliki Kim Il Sung. Bahkan Pemimpin kedua, Kim Jong Il serta Kim Jong Un sebagai

pemimping Korea Utara yang ketiga masih menggunakan ideologi *Juche* (Manzginrtior, 2016).

Krisis nuklir Korea Utara dimulai pertama kali saat Negara Korea Utara menarik diri dari Nuclear Non-Proliferation (NPT) atau Perjanjian Non-Proliferasi nuklir pada tahun 1993. Tindakan Korea Utara yang menarik diri dari NPT jelas menimbulkan reaksi dunia internasional. Khususnya Amerika Serikat. Korea Utara beberapa kali meluncurkan nuklirnya yaitu pada tahun 2006 sebanyak dua kali, pada tahun 2009 satu kali pada 2016 dua kali, dan 2017 satu kali. Tindakan ini mendapat kecaman dari Amerika Serikat dan Negara-negara di dunia. PBB kemudian memberi sanksi embargo keuangan dan militer yang keras terhadap Korea Utara. Uji coba nuklir ini melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1718 dan menuai kecaman dan kritik dari masyarakat internasional (May, 2015)

Amerika Serikat yang menganut Kebijakan Luar Negeri dengan hegemoni dalam memelihara perdamaian dunia tentu tidak bisa tinggal diam atas tindakan pengembangan dan percobaan nuklir Korea Utara tersebut. Seperti yang diketahui keberadaan nuklir Korea Utara menjadi ancaman dunia, sehingga Amerika Serikat di tuntutan untuk menerapkan kebijakan yang dapat mempertahankan stabilitas keamanan kawasan, terkhusus di kawasan Asia Timur. Amerika Serikat menganggap kebijakan yang akan di ambil Amerika Serikat terhadap Korea Utara akan sangat penting untuk tahun-tahun ke depan. Tentunya kebijakan tersebut di ambil secara hati-hati dan juga terdapat unsur politis sehingga tidak menimbulkan ketegangan yang berujung pada peperangan (Rantung K. E., 2017).

Sejak Korea Utara memulai pengembangan program nuklirnya, ancaman nuklir Korea Utara semakin meningkat pengembangannya. Ancaman tersebut tidak berubah hingga saat ini. Namun kebijakan Luar Negeri Presiden Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara tersebut berbeda-beda. Termasuk kebijakan Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump memiliki kebijakan yang berbeda dalam mengatasi ancaman nuklir Korea Utara. Setiap presiden Amerika Serikat yang menjabat membuat kebijakan masing-masing dan tidak melanjutkan kebijakan presiden sebelumnya. Perbedaan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat ini di karenakan Presiden Obama dan Presiden Trump berasal dari Partai Politik yang berbeda. Nilai-nilai Partai

Politik dari masing-masing Presiden ini melatar belakangi perbedaan Kebijakan Luar Negeri yang dibuat (Saragih, 2009).

Presiden Barack Obama sendiri di usung oleh Partai Demokrat yang merupakan rival dari Partai Republik pengusung Presiden Donald Trump. Dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya tentu terdapat perbedaan pandangan atau orientasi antara Partai Demokrat dan Partai Republik dalam menanggapi isu-isu yang terjadi dari pandangan-pandangan politikusnya. Hal tersebut kemudian berdampak terhadap keputusan yang di buat oleh Presiden dari masing-masing Partai Politik. Partai Demokrat merupakan partai yang memiliki orientasi terhadap perdamaian dan menjunjung tinggi hak kebebasan bersama. Sementara Partai Republik merupakan partai yang konservatif dengan tindakan yang lebih agresif dengan menggunakan kekuatan militer yang dimiliki Amerika Serikat dalam kebijakan luar negerinya (Lotha, 2016).

Kapabilitas suatu negara dalam bidang ekonomi dan militer menjadi faktor penting yang menentukan arah kebijakan luar negeri suatu negara, dalam arti semakin kuat perekonomian dan militer suatu negara dapat semakin kuat juga negara tersebut dalam mempertahankan kepentingannya di negara lain melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Amerika Serikat merupakan negara dengan kekuatan ekonomi terkuat didunia dan begitu juga dalam bidang militernya, Amerika Serikat memiliki kekuatan militer terkuat didunia. Kapabilitas yang di miliki Amerika Serikat ini di gunakan oleh Presiden Obama dan Presiden Trump dalam kebijakan luar negerinya terhadap Korea Utara (Jonathan, 2017).

Dalam menangani ancaman nuklir Korea Utara, Presiden Barack Obama dan Donald Trump memiliki kebijakan masing-masing. Model kebijakan antara Presiden Obama dan Presiden Trump pun berbeda. Perbedaan kebijakan luar negeri yang berbeda terhadap satu Negara yang sama ini bisa terjadi di karenakan masing-masing Presiden menggunakan orientasi yang berbeda. Obama mengeluarkan kebijakanyang lebih menekankan Soft Power dalam menghadapi pengembangan nuklir Korea Utara dan lebih memilih mengajak Negara di sekitar Korea Utara untuk bersama-sama menekan Korea Utara agar menghentikan program nuklir-nya. Unsur nilai-nilai Partai Politik tidak bisa di pungkiri dari lahirnya kebijakan Presiden Obama yang berasal dari Partai Demokrat yang mengedepakan nilai-nilai yang diplomatis dalam membuat kebijakan dan juga melibatkan

organisasi internasional dan Negara lain untuk membuat kebijakan terhadap ancaman dari Negara lain (Syahrin M. A., 2018).

Sementara Presiden Trump berkaca dari presiden Amerika Serikat sebelumnya dengan kebijakan yang sudah di keluarkan tetap tidak bisa menghentikan pengembangan program nuklir Korea Utara. Trump menilai kebijakan yang sudah-sudah harus di ubah. Trump mengeluarkan kebijakan yang menggabungkan Soft Power dan Hard Power menjadi Smart Power yang berisi kombinasi semua sarana dan solusi diplomatik, sanksi, pemotongan sumber ekonomi, penghentian pasokan pangan, diplomasi isolasi dan perundingan. Pada pemerintahan Trump kebijakan yang di keluarkan terhadap Korea Utara cenderung aktif dan lebih menekan Korea Utara untuk melakukan deneklurisasi dengan kekuatan Amerika sendiri. Kecenderungan lebih menekan Korea Utara dengan kekuatan Amerika Serikat sendiri yang di lakukan Presiden Trump ini juga menggambarkan nilai-nilai Partai Republik yang dibawa oleh Presiden Trump dalam membuat kebijakan luar negerinya (Liegl M. , 2017).

B. RUMUSAN MASALAH

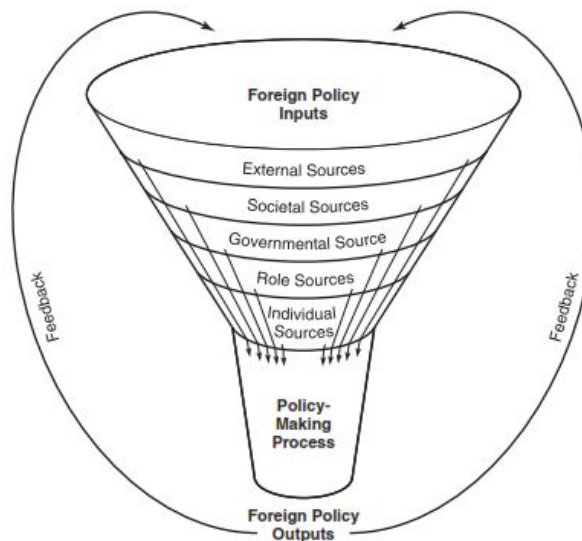
Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:
“Bagaimana pengaruh partai politik dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri untuk menekan program nuklir Korea Utara pada era Barack Obama dan Donald Trump?”

C. KERANGKA BERFIKIR

1. Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri

Dalam bukunya yang berjudul “American Foreign Policy: Pattern and Process” ada beberapa indikator yang diidentifikasi E. R. Wittkopf dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri di Amerika Serikat seperti *external sources*, *societal sources*, *governmental sources*, *role sources*, dan *individual sources*. Dalam membuat kebijakan Pengaruh-pengaruh tersebut digolongkan dalam satu *input*. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan dua indikator yang berkaitan dengan penelitian, yaitu *role of source* dan *Governmentl Sources* (Eugene & Charles, 2001).



Gambar 1.1 *Funnel of Causality*

External Sources

External Sources adalah factor input kebijakan luar negeri yang berasal dari sistem internasional dan karakteristik untuk pembuatan kebijakan luar negeri serta aktor negara dan non-negara. Keadaan dunia dengan tradisi-tradisi yang berlaku juga mempengaruhi gagasan kebijakan luar negeri suatu negara. Sebagian pemikir politik realis berpendapat dalam system internasional distribusi kekuasaan sangat mempengaruhi anggota negaranya akan bersikap. Hal tersebut membuat suatu Negara akan termotivasi untuk mendapatkan kekuasaan yang menguntungkan bagi negaranya. Jika di asumsikan setiap Negara memiliki persamaan motivasi, maka mengawasi interaksi negara-negara dalam arena internasional adalah cara dasar untuk memahami politik internasional dan kebijakan luar negeri (Wittkopf, Christopher M. Jones, & Kegley, 2008, hal. 19).

Societal Sources

Societal Sources (sumber masyarakat), yaitu seluruh karakteristik sosial domestik dan sistem politik yang membentuk orientasi masyarakat terhadap dunia. Seluruh aspek non-government dari sistem politik yang mempengaruhi *foreign policy*. Hal ini meliputi unsur keadaan geografi, nilai atau norma yang berkembang di masyarakat, etnis, popuasi, opini publik, dan lain-lain (Husna, 2014).

Kepentingan nasional pasti mencerminkan kebijakan luar negeri suatu Negara. Sumber kebijakan luar negeri yang berasal dari dalam negeri seperti kepentingan domestik, ideologi yang dianut, serta keadaan sosial-budaya masyarakat negara tersebut ini dibahas dalam *Societal sources* (Wittkopf, Christopher M. Jones, & Kegley, 2008, hal. 239-250).

Governmental Sources

Governmental sources merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang tanggung jawab dari sturuk dan politik dalam pemerintahan. Dimana seluruh elemen di dalam struktur pemerintahanlah yang memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait pilihan *foreign policy* baik sifatnyanya memperluas maupun membatasi pilihan yang nantinya akan diambil oleh para pembuat kebijakan, tuntutnya dalam lingkungan serta interaksi antar pihak-pihak di dalam pemerintahan (Adelins, 2020)

Governmental Source juga menitik beratkan pada presiden sebagai pemerintah yang memiliki wewenang melakuka n hubungan luar negeri untuk sumber pembuatan kebijakan luar negeri. Presiden memiliki kewenangan secara spesifik berupa membentuk dan membuat kebijakan luar negeri dan factor yang membentuk keistimewaan presiden. Dalam bekerja presiden tidak bekerja sendiri dan dibantu oleh badan pembantu presiden yaitu badan penasehat kepresidenan, staff ahli politik, badan eksekutif, departemen dan agensi agensi yang ada. Tapi tetap inti dari kebijakan luar negeri suatu Negara pada hakekatnya pada presiden (Wittkopf, Christopher M. Jones, & Kegley, 2008, hal. 20-21).

Terpilihnya Presiden tak lepas dari campur tangan partai yang mendukungnya. Dalam pembuatan kebijakan luar negeri, seluruh aspek elemen dari struktur pemerintahan atau rezim yang berkuasa pada saat itu mempunyai andil besar dalam memberi pertimbangan terhadap keputusan presiden. Sehingga, partai yang dinaungi oleh presiden juga mempunyai andil dalam pembuatan kebijakan luar negeri.

Role Sources

Karakteristik antara *Role source* dan *governmental source* memang hampir sama. *Role Sources* menjelaskan individu yang memiliki peran yang terikat di dalam system pemerintahan dan memiliki kedudukan di sistem pemerintahan. Perilaku sosial dan sanksi norma legal yang melekat dengan kedudukan yang sedang dijalani dianggap memiliki peran penting dalam pembuatan keputusan. Permintaan dan ekspektasi sosial serta psikologi yang membentuk persepsi bagaimana kebijakan harus dilaksanakan dimiliki setiap peran atau kedudukan. Dampaknya pada kebijakan yang mau tidak mau dipengaruhi oleh peran dalam membuat keputusan akibat adanya hubungan antara perilaku dengan posisi atau kedudukan. Teori peran adalah perilaku orang-orang yang membentuk perilakunya. Hal ini berarti jika kita memahami asal kebijakan luar negeri Amerika Serikat, peran pembuatan kebijakan luar negeri harus kita uji perilaku kerabat dekat pembuat kebijakannya sebagai bahan evaluasi (Pangesti, 2020).

Teori ini menjelaskan bagaimana dalam pengambilan keputusan seorang presiden memiliki tindakan yang sama dengan presiden-presiden sebelumnya. Perlu diketahui bahwa peran lebih menentukan tindakan individu daripada kualitas individunya. Jenis rekomendasi kebijakan yang biasanya dibuat dari sebuah organisasi yang memiliki sistem birokrasi yang luas dijelaskan di konsep peran ini. Penyesuaian sikap dalam birokrasi dan cara pandang mereka terhadap sesuatu dituntun oleh tekanan peran. Tekanan ini diperoleh dari diri sendiri, kerabat dan bisa juga diperoleh dari atasan. Jadi, jika setiap orang berperilaku sama dengan orang lain maka orang tersebut akan memiliki peran yang sama pula (Pangesti, 2020).

Di jelaskan dalam teori Hukum Mile teori peran adalah “dimana kedudukan seorang (dalam kebijakan) tergantung pada dimana orang tersebut duduk (dalam pemerintahan)” lebih ringkasnya perilaku dan keputusan yang akan dibuat dan cara menjalankan hasil kebijakan pasti akan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan. Peran individu pelaku dan tekanan yang didapat dari lingkungan sekitarnya akan dibahas didalam teori peran. Permintaan dan ekspektasi sosial tersendiri serta psikologi yang membentuk persepsi bagaimana sebuah kebijakan dilaksanakan dimiliki setiap peran atau posisi. Pelaku

pembuat kebijakan sendiri akan menerima tekanan dari pelaku lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi, kerabat dan juga diri sendiri.

Perubahan konsepsi peran lebih ditekankan pada perubahan kebijakan daripada perubahan individual yang sedang menjalani perannya. Dalam teori ini peran individu tidak dianggap penting karena lebih menekankan pada peran institusi yang membentuk perilaku pelaku dan membatasi kebebasan dalam membuat keputusan. Dalam membuat kebijakan perlu diketahui bahwa pembuat kebijakan tidak memiliki kekebalan. Mereka membawa tanggung jawab, permintaan, dan bentuk perilaku tertentu. Tekanan mendorong orang yang memiliki peran dalam suatu instansi untuk berfikir dan berperilaku seperti pendahulunya. Bisa juga model perilaku pengganti pelaku berbeda dengan pendahulunya (Pangesti, 2020)

Dalam menjelaskan perilaku pembuat keputusan terdapat batasan kemampuan pada teori peran ini. Untuk memperluas batasan perilaku yang diperbolehkan, kepribadian yang dipaksakan dalam melakukan suatu peran akan menentukan ulang peran itu sendiri. Perilaku individu yang terlibat menjadi tidak dapat terprediksi akibat beberapa peran memperbolehkan interpretasi satu indikator dan beberapa memiliki batasan yang luas dan fleksibel. Dapat disimpulkan banyak peran yang saling berlawanan dengan tekanan yang bisa menarik individu tersebut ke arah yang beragam akibat individu menempati kedudukan tinggi dalam pemerintahan. Indikator yang paling penting dari beberapa faktor dalam hal menyelesaikan konflik adalah “peran dari dirinya sendiri tidak dapat menjelaskan posisi yang diambil oleh individu pembuat keputusan”. Perubahan peran total di dalam pembuatan kebijakan atau konsepsi individu didapatkan melalui pembuatan tujuan dan inovasi kebijakan. Arah kebijakan akan mengikuti kemana arah peran yang ada dalam sistem pembuatan keputusan dan perubahan pelaksanaan intrepertasi itu sendiri (Wittkopf, Christopher M. Jones, & Kegley, 2008, hal. 21-22; 456-457).

Individual Sources

Individual sources menjelaskan tentang pembuatan kebijakan luar negeri yang didasari oleh individu dalam hal kepercayaan, keahlilan dan kecenderungan psikologi yang menjelaskan bagaimana karakteristik individu tersebut dan jenis perilaku yang dimiliki. *individual sources* tidak hanya menilai dari sifatnya melainkan juga menilai dari kecakapan, ideology, dan pengalaman utama yang membedakan individu dengan individu

yang lain serta kebijakan luar negeri suatu Negara dengan kebijakan luar negeri Negara yang lain. Dapat dikatakan *individual sources* menganalisa *input* kebijakan luar negeri berdasarkan keunikan karakteristik individu yang bersangkutan (Wittkopf, Christopher M. Jones, & Kegley, 2008, hal. 23).

Dari penjeasan teori pembuatan kebijakan luar negeri di atas dapat dilihat bahwa *Role Sources* dan *Governmentl Sources* saling berkaitan dalam pembuatan kebijakan luar negeri sebuah negara, dan secara khusus Amerika Serikat dalam kasus nukli Korea Utara. Dimana sudah dijelaskan diatas dan ditarik kesimpulan bahwa elemen dari struktur pemerintahan yang memberikan pertimbangan-pertimbangan akan pilihan *foreign policy* yang akhirnya ditentukan pemerintah sebagai pembuat keputusan terkait kebijakan luar negeri. Tetapi keputusan dalam pengambilan kebijakan luar negeri tidak akan lepas dari faktor internal suatu negara, seperti faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik dalam negeri, kelompok kepentingan, dan lain-lain. Selain itu, faktor eksternal juga tetap menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan sebuah kebijakan luar negeri suatu negara, dengan saling mengkondisikan faktor internal dan faktor eksternal maka akan terbentuklah sebuah kebijakan sesuai dengan keinginan nasional negaranya masing-masing. Partai Politik juga mempunyai pengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri dan dijelaskan di bawah ini. Penjelasan pentingnya Partai Politik dalam kebijakan luar negeri diperkuat melalui pembahasan konsep Partai Politik berikut ini.

2. Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan public melalui pemilihan umum. Seorang individu akan kesulitan untuk memasukkan dirinya dalam sistem pemerintahan jika tidak bergabung dengan partai politik. Melalui partai politik dapat membantu proses individu masuk kedalam kursi pemerintahan. Kandidat yang diusung oleh partai politik dapat dipilih melalui penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan sebuah Negara sebagai sarana dalam memilih anggota pemerintahan. Siapa saja yang berhak menempati kursi pemerintahan ditentukan hasil pemilu tersebut. Partai politik yang banyak dipilih oleh masyarakat akan mengisi kursi pemerintahan yang ada (Pangesti, 2020).

Amerika Serikat termasuk negara demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Adanya partisipasi rakyat dalam urusan pemerintahan maupun bernegara adalah ciri utama Negara demokrasi. Demokrasi presidensial ialah sistem demokrasi yang dipakai oleh Amerika Serikat, demokrasi presidensial adalah negara yang dipimpin oleh presiden dan yang menjalankan roda pemerintahan (eksekutif) adalah presiden. Seseorang dapat menjadi presiden ketika dipilih langsung oleh rakyat atau melalui perwakilan *electoral college* seperti yang ada pada system.

Partai politik adalah hasil terbaru dari sistem politik modern. Adanya fungsi yang sama dalam perkembangan tingkatan sistem politik seperti sosial, politik, dan ekonomi menandai kemunculan partai politik. Menurut Joseph La Palombara dan Myron Weiner setidaknya harus ada empat karakteristik di dalam sebuah partai politik yaitu: (1) organisasi yang bersifat berkelanjutan yang tidak bergantung kepada satu pemimpin saja; (2) menunjukkan organisasi permanen pada level lokal dengan komunikasi secara berkala antara organisasi lokal maupun nasional; (3) kesadaran sendiri untuk menentukan pemimpin pada tingkat lokal maupun nasional dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pembuatan keputusan sendiri atau secara koalisi dengan lainnya; dan (4) memiliki perhatian khusus dalam organisasi untuk mencari pengikut untuk polling atau dukungan politik (La Palombara & Weiner, 1996).

Kemampuannya untuk mengontrol kekuasaan pemerintah dengan menempatkan anggota partai politiknya, melalui pemilihan umum, ke dalam lingkup pemerintahan adalah Karakteristik utama dari partai politik. Setelah menduduki jajaran pemerintahan anggota partai politik menggunakan kekuasaan pemerintah dengan tujuan memasukkan nilai-nilai partai tersebut dalam kebijakan pemerintahan. Durabilitas dan organisasi merupakan dua hal yang berhubungan satu sama lain merupakan karakteristik terakhir yang harus dimiliki sebuah partai politik. Untuk memudahkan kemampuan organisasi maka mengontrol pemerintah dari dalam diperlukan. Di sisi lain pada masa yang akan datang durabilitas dibutuhkan untuk keberlangsungan partai politik meskipun memiliki pemimpin pengganti (Marume, Chikasha, & Ndudzo, 2016, hal. 141).

Definisi partai politik dari beberapa konsep tersebut adalah suatu kelompok yang mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dan anggota kelompoknya terorganisir. Ada beberapa fungsi yang dimiliki partai politik, antara lain: (1) Sebagai

penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Dalam pembuatan kebijakan dan masyarakat tidak memiliki wadah yang tepat untuk menyalurkan aspirasinya kepada pemerintahan partai politik memiliki fungsi *input* disini; (2) Sebagai pengumpulan kepentingan. Partai politik disini berperan sebagai penampung kepentingan dari kelompok kepentingan maupun organisasi yang lebih besar. Partai politik mendapatkan keuntungan berupa koalisi dari kelompok kepentingan; (3) Integrasi sistem politik. Reprerentasi kelompok kepentingan juga diperankan oleh partai politik; (4) Sosialisasi Politik. Agar sistem pemerintahan berjalan dengan lancar seperti pemilihan umum, sosialisasi politik sangat diperlukan. Kampanye adalah salah satu peran partai politik dalam pemilu, karena kepedulian masyarakat terhadap pemilihan umum akan berkurang tanpa adanya kampanye; (5) Mobilisasi pengambilan suara; dan (6) Sebagai organisasi pemerintah. Setelah mendapatkan pekerjaan di pemerintahan dari hasil pemilu, partai yang memenangkan pemilihan umum dapat mengubah kebijakan sesuai dengan kepentingannya (Roskin, Cord, Medeiros, & Jones, 2017, hal. 189-193).

Contoh kasus fungsi partai politik sebagai organisasi pemerintah adalah sebagai berikut: Amerika Serikat memiliki sistem dapat menunjuk ketua majelis dan anggota komite dari mayoritas yang mengisi kursi DPR atau Senat. Untuk mengisi bagian eksekutif dan agen Presiden dapat menunjuk hingga 3.000 orang, dan selama empat tahun tersebut dapat memberikaan kuasa kepada partai untuk mengendalikan kebijakan. Adanya suatu sistem pemerintahan memang menjadi cikal bakal terbentuknya partai politik karena tanpa adanya partai politik kehidupan pemerintahan tidak teragendakan dengan baik dan tidak terstruktur (Roskin, Cord, Medeiros, & Jones, 2017, hal. 189-193).

Ideologi dan nilai partai dapat menarik masyarakat untuk menjadi anggota partainya serta perekat antar anggota partai adalah suatu hal yang dimiliki partai politik. Ideologi adalah kerangka kerja yang dibagikan kepada model mental sekelompok individu yang dapat menginterpretasi lingkungan dan langkah-langkah bagaimana lingkungan tersebut harus dibentuk. Ideologi yang lama terbentuk dan dikomunikasikan dengan baik biasanya membagikan nilai-nilai pendapat, dan kepercayaan dalam suatu kelas, kelompok, konstituensi, atau bahkan masyarakat. Ideologi dari Fungsi psikologi-sosial terbagi menjadi dua yaitu *discursive superstructure* dan *functional superstructure*. Hubungan konstruk sosial seperti perilaku, nilai, dan kepercayaan yang diikat menjadi satu oleh posisi ideologi

disatu waktu dan tempat adalah tujuan dari *Discursive superstructure*. Representasi sosial atau *Functional Superstructure* adalah skema *top-down* untuk sebuah penilaian politik. Penilaian ini biasanya dimulai dari elit politik ke masyarakat umum. Mengumpulkan kebutuhan sosial dan psikologis, tujuan, dan motif yang mendorong kepentingan politik masyarakat biasa hingga kepentingan tersebut bisa dituangkan dalam suatu ideology adalah tujuan dari *Functional superstructure* (Josh & Napier, 2009, hal. 315)

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dapat dipengaruhi oleh partai politik. Terdapat dua partai politik di Amerika Serikat yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Kebijakan luar negeri di Amerika Serikat juga tergantung pada partai mana yang sedang mendominasi pemerintahan. Partai Demokrat dan Partai Republik adalah kedua partai politik yang memiliki perbedaan yang cukup mencolok dalam kebijakan-kebijakan mereka. Ideologi yang dianut Presiden berasal dari salah satu partai tersebut akan memberikan pengaruh besar pada berbagai kebijakannya.

D. HIPOTESA

Menurut penjelasan dasar teori yang sudah penulis sampaikan, dapat diambil dugaan atas sebab perbedaan pengambilan kebijakan tentang program pengembangan nuklir Korea Utara pada pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump yaitu:

Dalam mengambil keputusan kebijakan luar negeri Barack Obama dan Donald Trump turut dipengaruhi oleh Partai Politik yang menyebabkan lahirnya dua model kebijakan berbeda antara keduanya. Obama dipengaruhi partai Demokrat yang menganut ideologi Liberal yang menekankan bahwa keamanan internasional dapat dijamin melalui kerjasama *multilateral* dalam membuat kebijakan luar negeri. Sedangkan Trump dipengaruhi oleh partai Republik yang menganut ideologi Konservatif yang menekankan bahwa keamanan negara perlu didukung oleh kekuatan militer maupun intelijennya dalam membuat kebijakan luar negeri.

E. JANGKAUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis membandingkan kebijakan Amerika Serikat terhadap pengembangan program nuklir Korea Utara pada masa kepemimpinan Barack Obama pada tahun 2015 dan pada masa kepemimpinan Donald Trump pada tahun 2019.

F. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kebijakan Barack Obama dan Donald Trump dalam pengembangan program nuklir Korea Utara yang dipengaruhi kedua partai yang berbeda.

G. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini perlu adanya metode dalam menjawab rumusan masalah. Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif.

2. Sumber data dan Jenis

Data Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dokumen dari situs resmi atau situs berita sebagai sumber utama penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka sendiri dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan kebijakan Barack Obama dan Donald Trump untuk menangani pengembangan nuklir Korea Utara.

4. Teknik Analisa Data

Data yang didapatkan oleh penulis akan dianalisis dengan analisis kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis maupun kata yang diucapkan oleh narasumber.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penelitian ini menjadi lebih mudah dipahami maka penulis membagi penelitian tentang perbedaan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap pengembangan program nuklir Korea Utara pada masa pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump kedalam sistematika penulisan yang berisi 5 bab.

1. Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode, serta sistematika penulisan.
2. Bab dua membahas tentang kebijakan *Strategic Patience* Barack Obama dalam menangani pengembangan nuklir Korea Utara.
3. Bab tiga membahas tentang kebijakan *Maximum Pressure and Engagement* Donald Trump dalam menangani pengembangan nuklir Korea Utara.
4. Bab empat membahas tentang pengaruh Partai Politik terhadap Kebijakan Luar Negeri Barack Obama dan Donald Trump untuk menekan program nuklir Korea Utara.
5. Bab lima berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.